

Politik sebagai mata pelajaran mandiri: solusi untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda

Didi Maslan

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMP B Medan
Medan Sumatera Utara

Co-Author: **Didi Maslan**

E-mail: didimaslan03@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana politik sebagai mata pelajaran mandiri dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi politik sebagai mata pelajaran mandiri memiliki manfaat seperti; meningkatkan keterlibatan generasi muda, membangun sikap kritis, membentuk kepemimpinan berkualitas, serta mencegah maraknya politik uang. Langkah- Langkah dalam mengimplementasikan politik sebagai mata pelajaran mandiri yaitu pengembangan kurikulum yang komprehensif, menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan menarik bagi siswa, serta melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya meliputi kurangnya tenaga pengajar yang kompeten dalam bidang politik, adanya resistensi terhadap pembelajaran politik di sekolah karena dianggap sensitif atau kontroversial, serta bias dalam penyampaian materi jika tidak diajarkan secara objektif. Solusi untuk mengatasi tantangan yang ada meliputi mengadakan pelatihan bagi guru agar memiliki pemahaman politik yang netral dan berbasis akademik, menyusun kurikulum yang berbasis pada pendekatan ilmiah dan non-partisan, serta menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga riset untuk mendukung pengembangan materi ajar.

Kata Kunci: generasi muda, partisipasi politik, Pendidikan politik

ABSTRACT

This study aims to explore how politics as an independent subject can be a strategic solution to increase the political participation of the younger generation in Indonesia. The method used in this study is a qualitative method with a literature study type. The results of the study indicate that the implementation of politics as an independent subject has benefits such as; increasing the involvement of the younger generation, building critical attitudes, forming quality leadership, and preventing the spread of money politics. The steps in implementing politics as an independent subject are developing a comprehensive curriculum, using interactive and interesting teaching methods for students, and collaborating with external parties. The challenges that may be faced in its implementation include the lack of

competent teaching staff in the field of politics, resistance to political learning in schools because it is considered sensitive or controversial, and bias in delivering material if it is not taught objectively. Solutions to overcome existing challenges include conducting training for teachers to have a neutral and academic-based understanding of politics, compiling a curriculum based on a scientific and non-partisan approach, and collaborating with higher education institutions and research institutions to support the development of teaching materials.

Keywords: young generation, political participation, Political education



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Terlaksananya demokrasi di sebuah negara dapat berjalan sehat dan berkualitas jika masyarakat memiliki keterlibatan yang kuat dalam ranah politik. Namun, di Indonesia, masih banyak masyarakat yang memilih golput saat Pemilu, menunjukkan rendahnya partisipasi politik. Fenomena ini bukan tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh sikap apatis terhadap politik yang dianggap hanya menguntungkan elit (Suparto, 2021). Sikap apatis tersebut semakin diperburuk oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga politik dan para pemimpinnya. Banyak warga merasa bahwa aspirasi mereka tidak benar-benar didengar atau diwujudkan dalam kebijakan publik. Di sisi lain, kurangnya edukasi politik yang merata juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam demokrasi.

Salah satu kelompok yang memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi adalah generasi muda. Partisipasi politik generasi muda merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Generasi muda, sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa, memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik di masa depan. Namun, data menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik, seperti pemilu, diskusi kebijakan, atau kegiatan advokasi, masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat partisipasi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi politik generasi muda adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap isu-isu politik dan proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Banyak generasi muda yang merasa bahwa politik adalah sesuatu yang rumit, jauh dari kehidupan sehari-hari, dan bahkan dianggap tidak relevan dengan aspirasi mereka. Hal ini diperparah dengan stigma negatif terhadap politik yang sering kali

diasosiasikan dengan konflik, korupsi, dan manipulasi. Sebagai akibatnya, banyak generasi muda yang memilih untuk bersikap apatis dan tidak aktif dalam proses politik. Padahal ketika mereka berpartisipasi dalam politik, sesungguhnya mereka sedang ikut serta dalam menentukan segala hal yang menjadi keputusan dan akan memiliki pengaruh dalam semua lini kehidupannya (Suparto, 2021).

Dalam konteks pendidikan, mata pelajaran yang berkaitan dengan politik, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan generasi muda akan literasi politik yang komprehensif. Materi yang diajarkan sering kali bersifat normatif dan kurang membahas isu-isu politik kontemporer yang relevan. Selain itu, metode pengajaran yang cenderung monoton dan berbasis hafalan membuat siswa kurang tertarik untuk mendalami politik secara mendalam. Hal senada juga diungkapkan oleh Nissa dkk (2024) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat pembelajaran PKn selama ini tidak mampu menjawab kebutuhan literasi politik adalah metode pengajaran yang digunakan terlalu monoton, kurangnya variasi dan kreasi dari guru. Hal ini juga diperparah dengan jaranganya guru yang mampu mengelaborasi beberapa metode pembelajaran dalam sebuah proses pembelajaran.

Melihat tantangan ini, perlu adanya inovasi dalam pendekatan pendidikan politik di sekolah. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menjadikan politik sebagai mata pelajaran mandiri dalam kurikulum pendidikan formal. Dengan menjadikan politik sebagai mata pelajaran tersendiri, siswa dapat diberikan ruang yang lebih luas untuk memahami teori, praktik, dan dinamika politik secara terstruktur dan mendalam. Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif terhadap politik dan membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi politik sejak usia dini. Di beberapa negara maju, pendidikan politik telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan formal, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Misalnya, Inggris dan Prancis telah lama mengakui pentingnya politik sebagai disiplin ilmu tersendiri, yang ditandai dengan berdirinya *Ecole Libre des Sciences Politiques* di Paris pada tahun 1870 dan *London School of Economics and Political Science* di London pada tahun 1895. Di Indonesia sendiri, meskipun pendidikan politik belum diterapkan secara luas di tingkat sekolah, beberapa perguruan tinggi telah mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, seperti di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan di Universitas Indonesia (UI) (Budiardjo, 2008).

Namun, di Indonesia, pendidikan politik formal masih terbatas pada perguruan tinggi dan belum menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa politik terlalu kompleks serta kekhawatiran akan politisasi di sekolah. Padahal, politik berpengaruh pada kehidupan setiap warga negara, sehingga penting untuk diajarkan sejak dini (Tuhuteru, 2022). Kurangnya

pendidikan politik ini turut berkontribusi pada rendahnya kesadaran politik generasi muda. Muhtadi sebagaimana yang dikutip oleh Bakry dkk. (2024) menyoroti rendahnya pemahaman politik generasi muda, yang berakibat pada minimnya partisipasi mereka dalam demokrasi dan potensi manipulasi politik. Oleh karena itu, pendidikan politik yang inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Salah satu solusi terhadap hal tersebut adalah menjadikan politik sebagai mata pelajaran mandiri yang. Namun, implementasi mata pelajaran ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kekhawatiran akan penyalahgunaan politik di sekolah. Oleh karena itu, kurikulumnya harus netral, berbasis bukti, dan inklusif. Penelitian ini akan mengeksplorasi strategi penerapan politik sebagai mata pelajaran mandiri serta urgensi, tantangan, dan solusi yang menyertainya. Dengan pendidikan politik yang tepat, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi lebih matang dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun sumber akademik lainnya yang relevan dengan topik yang sedang dikaji (Hasibuan et al., 2024). Dalam penelitian ini, literatur yang akan digunakan terdiri dari buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik kajian. Proses analisis data dilakukan dengan menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai pandangan dari sumber yang digunakan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi politik sebagai mata pelajaran mandiri

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun, salah satu tantangan dalam mewujudkan hal ini adalah keterbatasan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam memberikan pemahaman politik yang mendalam. PKn yang diajarkan di sekolah-sekolah selama ini masih terbatas dalam memberikan pemahaman politik yang mendalam kepada siswa. Materi yang diajarkan lebih banyak berfokus pada konsep-konsep normatif seperti Pancasila, UUD 1945, dan hak serta kewajiban warga negara, tanpa memberikan pemahaman yang cukup tentang sistem politik, kebijakan publik, dan dinamika demokrasi (Aulia et al., 2024). Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman politik di kalangan generasi muda, sehingga mereka cenderung kurang aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya (Sugara et al., 2024).

Akibatnya, tujuan PKn belum tercerminkan dalam proses pembelajarannya.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan tugas yang wajib bagi seluruh lapisan masyarakat hari ini (Wahid & Sadaruddin, 2024). Disinilah sebenarnya PKn sebagai mata pelajaran hadir dalam melaksanakan tugas tersebut. Namun, dalam implementasinya, pembelajaran cenderung teoritis dan normatif, di mana siswa lebih banyak menghafal konsep daripada mengembangkan pemikiran kritis terhadap dinamika politik. Selain itu, materi PKn lebih menekankan aspek hukum dan pemerintahan tanpa membahas strategi partisipasi politik secara langsung. Minimnya diskusi isu aktual juga menghambat kemampuan analisis politik mereka. Kelemahan lainnya adalah metode pembelajaran yang masih satu arah, tanpa pendekatan interaktif yang memungkinkan siswa terlibat langsung dalam praktik politik. Akibatnya, mereka kurang memahami bagaimana kepentingan politik memengaruhi kebijakan publik dan tidak memiliki wawasan politik yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari dampak negatif yang mungkin saja timbul dari gagasan ini, ada begitu banyak manfaat ketika politik dijadikan sebagai mata pelajaran mandiri bagi generasi muda. Diantara manfaat-manfaat yang dimaksud adalah: *Pertama*, meningkatkan keterlibatan generasi muda. Mata pelajaran politik yang berdiri sendiri dapat meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam demokrasi dengan memberikan pemahaman mendalam tentang sistem politik, kebijakan publik, serta peran lembaga negara (Mii et al., 2023). Selain itu, mata pelajaran ini mendorong partisipasi aktif dalam pemilu, diskusi kebijakan, dan advokasi sosial, sekaligus memperkuat kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Prayugo & Prayitno, 2022). Hal ini dapat menjadi solusi terhadap rendahnya partisipasi anak muda dalam demokrasi.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik, proses kebijakan, dan hak serta kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat lebih sadar akan pentingnya keterlibatan mereka dalam politik. *Kedua*, membangun sikap kritis. Mata pelajaran politik dapat membangun sikap kritis dalam menghadapi informasi yang beredar di masyarakat. Dengan keterampilan analisis politik yang baik, generasi muda dapat membedakan antara berita yang kredibel dan propaganda yang menyesatkan. Ini akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih bijak, baik dalam memilih pemimpin maupun dalam menanggapi berbagai isu politik yang berkembang. Sikap kritis ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya potensi golput dan apatisisme politik di kalangan generasi muda. Banyak dari mereka merasa bahwa dunia politik dipenuhi dengan ujaran kebencian serta janji kampanye yang tidak diimplementasikan secara maksimal oleh para calon pemimpin. Akibatnya, ketidakpercayaan terhadap sistem politik pun semakin

meluas (Aulia et al., 2024). Dalam situasi ini, pendidikan politik yang baik dapat menjadi solusi untuk menumbuhkan kembali kepercayaan generasi muda terhadap demokrasi.

Ketiga, membentuk kepemimpinan berkualitas. Mata pelajaran politik berperan penting dalam membentuk kepemimpinan muda yang berkualitas karena pada dasarnya, pendidikan politik bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan keterampilan yang mereka butuhkan dalam keikutsertaan mereka dalam kehidupan politik, baik sebagai warga negara maupun sebagai pemimpin politik (Azmi et al., 2023). Misalnya, pemahaman tentang etika politik dan mekanisme pemerintahan yang sehat, akan melahirkan pemimpin berintegritas dan visioner. Selain itu, pendidikan politik juga dapat memperkuat karakter kepemimpinan generasi muda di tengah tantangan berkurangnya jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan harus menjadi agenda utama dalam pendidikan politik. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan plural, dibutuhkan pemimpin yang mampu menjalankan peran demokratis dengan menghargai keberagaman. Pendidikan politik akan membekali mereka dengan keterampilan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak hanya membangun kesadaran politik, tetapi juga mencetak pemimpin yang menjaga persatuan dan keadilan sosial (Sanusi & Darmawan, 2016).

Keempat, mencegah maraknya politik uang (*money politic*). Salah satu tantangan terbesar dalam politik modern, terutama di negara-negara berkembang adalah maraknya praktik politik uang. Politik uang merusak prinsip demokrasi yang jujur dan adil karena pemilih sering kali memilih kandidat bukan berdasarkan kapabilitas dan integritas, melainkan atas dasar imbalan materi yang diberikan. Celakanya, tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa politik uang (*money politic*) bukan merupakan peristiwa yang bertentangan dengan moral dan etika. Melainkan sebuah upaya untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang memilih seseorang (Kurniawan et al., 2023). Untuk mencegah hal ini, diperlukan langkah preventif yang dimulai sejak dini, salah satunya dengan menjadikan politik sebagai mata pelajaran mandiri di sekolah.

Politik uang merupakan musuh bersama yang merusak mekanisme pergantian kekuasaan, yang harusnya dijalankan di atas asas kejujuran dan keadilan (Fajarani et al., 2024). Dalam Islam, praktik ini termasuk korupsi yang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan (Aminuddin & Kumalasari, 2024). Fenomena ini tidak hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga menciptakan budaya korupsi yang mengakar dalam sistem pemerintahan. Jika dibiarkan terus berkembang, maka legitimasi pemimpin yang terpilih akan dipertanyakan, dan kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kesadaran

kolektif untuk menolak politik uang harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan.

Implementasi Politik Sebagai Mata Pelajaran Mandiri

Untuk mengatasi kekurangan dalam pendidikan politik yang diberikan melalui PKn, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah mengintegrasikan pendidikan politik secara lebih sistematis dalam kurikulum sekolah. Dalam konteks itu, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan politik sebagai mata pelajaran mandiri diantaranya:

a. Pengembangan kurikulum yang komprehensif

Menurut Laros Tuhuteru (2022), instruksi Presiden No. 12 Tahun 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah kebijakan pendidikan politik di Indonesia. Dikeluarkan pada masa perjuangan kemerdekaan, instruksi ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran politik di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Pada saat itu, pemahaman tentang politik tidak hanya dianggap sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Sejalan dengan semangat yang terkandung dalam instruksi tersebut, kurikulum politik yang baik harus dimulai dengan pemahaman mengenai konsep dasar politik. Siswa perlu mengenali definisi politik, fungsi politik dalam kehidupan bermasyarakat, serta peran individu dalam dinamika politik. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1928 menekankan pentingnya pendidikan politik yang membangun kesadaran nasional dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep-konsep seperti kekuasaan, otoritas, legitimasi, dan partisipasi politik merupakan bagian dari pembelajaran yang harus diberikan sejak dini. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini akan membantu siswa menghubungkan politik dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka menyadari bahwa politik bukan hanya milik elite, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam konteks modern, semangat dari instruksi ini tetap relevan, yaitu menanamkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem pendidikan politik Indonesia. Selain itu, sistem pemerintahan harus menjadi bagian integral dalam kurikulum, mengingat setiap negara memiliki sistem politik dan pemerintahan yang berbeda-beda. Menurut Setiyono (2024), beberapa bentuk sistem pemerintahan di dunia antara lain autokrasi (kekuasaan dipegang oleh satu penguasa), demokrasi (kekuasaan berada di tangan mayoritas rakyat), monarki (kerajaan), serta oligarki (kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang). Siswa perlu memahami bagaimana sistem pemerintahan di negaranya sendiri bekerja, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif,

dan yudikatif. Disamping itu, kurikulum juga harus membahas sistem pemerintahan negara lain agar siswa dapat membandingkan dan menganalisis kelebihan serta kelemahan dari masing-masing sistem serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

Selain pengetahuan teknis mengenai politik dan pemerintahan, etika politik juga harus menjadi bagian dari kurikulum. Etika politik mengajarkan nilai-nilai moral dalam berpolitik, seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tanpa etika politik yang kuat, politik mudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pembelajaran etika politik harus menekankan bahwa politik adalah alat untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal (3b) yang menyatakan bahwa pendidikan politik mencakup berbagai kegiatan, seperti pendalaman empat pilar berbangsa dan bernegara dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik. Selain itu, pendidikan politik juga mencakup pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin politik yang berintegritas dan memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat (Prayugo & Prayitno, 2022).

Dengan menyusun kurikulum yang mencakup konsep dasar politik, sistem pemerintahan, serta etika politik, pendidikan politik dapat menjadi lebih komprehensif dan bermakna. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek ini akan membantu siswa mengembangkan kesadaran politik yang lebih baik, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berpolitik. Agar pendidikan politik lebih efektif, materi yang diajarkan harus selalu diperbarui dan relevan dengan perkembangan politik kontemporer. Politik adalah bidang yang dinamis dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, sehingga kurikulum tidak boleh terpaku pada teori klasik semata. Sebagai contoh, perubahan dalam kebijakan pemerintahan, pemilihan umum, atau gerakan sosial di dalam dan luar negeri harus dimasukkan dalam pembelajaran agar siswa dapat memahami bagaimana politik bekerja dalam konteks yang nyata. Namun materi-materi mengenai ideologi bangsa, konstitusi negara, lembaga-lembaga negara, wawasan kebangsaan, dan etika politik tetap harus menjadi materi dasar yang diajarkan kepada siswa (Abdillah, 2024).

b. Menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan menarik bagi siswa

Dari berbagai metode dan pendekatan yang biasa digunakan dalam pembelajaran, ada beberapa metode interaktif yang efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran politik yaitu: 1) Diskusi kelompok dan debat. Diskusi dan debat melatih siswa berpikir kritis,

memahami konsep, serta menghargai pendapat orang lain (Agustiani et al., 2019). Dalam kegiatan ini, mereka membahas topik politik seperti sistem pemerintahan atau kebijakan publik dengan data dan argumen yang kuat. Debat membantu mereka berkomunikasi secara logis, memahami berbagai sudut pandang, serta menganalisis masalah secara mendalam melalui kerja sama dan diskusi kelompok; 2) Metode Simulasi. Metode ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang meniru situasi atau kondisi nyata dalam bentuk permainan peran, skenario, atau model tertentu agar peserta didik dapat memahami konsep secara lebih konkret (Marzuki, 2024). Dalam konteks pembelajaran politik, metode ini dapat diterapkan melalui berbagai bentuk simulasi, seperti pemilu, sidang parlemen, atau perancangan kebijakan publik. Dalam simulasi ini, siswa diberikan peran tertentu, misalnya sebagai calon presiden, anggota parlemen, atau pemilih, sehingga mereka dapat memahami secara langsung bagaimana proses politik berlangsung; 3) Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa meneliti isu politik, seperti kebijakan pendidikan atau kesejahteraan sosial, guna melatih riset, analisis, dan berpikir kritis berbasis fakta.

Dengan data valid, mereka dapat memahami kompleksitas masalah politik serta dampaknya. Selain itu, metode ini membantu siswa menghubungkan teori dengan realitas serta meningkatkan keterampilan kolaborasi mereka (Saptadi, Holid, et al., 2024); 4) Kunjungan lapangan (*field trip*). Metode ini adalah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan observasi langsung di luar lingkungan kelas untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari (Komnas HAM, 2017). Dalam pembelajaran politik, misalnya, siswa dapat mengunjungi lembaga seperti DPRD, KPU, atau kantor pemerintahan daerah untuk memahami sistem pemerintahan dan proses pengambilan keputusan secara nyata. Dengan menerapkan metode pengajaran yang interaktif dan menarik, pendidikan politik dapat menjadi lebih efektif dalam membangun kesadaran dan partisipasi siswa dalam kehidupan bernegara.

c. Melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal

Dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa mengenai politik dan pemerintahan, kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Pihak eksternal yang dapat diajak bekerja sama meliputi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, institusi pendidikan tinggi, media, serta tokoh politik dan akademisi. Melalui kolaborasi ini, sekolah dapat menghadirkan wawasan yang lebih luas dan mendalam bagi siswa, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan teori dalam kelas, tetapi juga pengalaman nyata mengenai bagaimana sistem politik dan pemerintahan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari (Saptadi, Holid, et al., 2024). Sekolah dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintah seperti KPU,

Bawaslu, dan DPRD untuk memberikan edukasi politik tentang pemilu, peran legislatif, dan pentingnya partisipasi demokrasi. Kemitraan dengan organisasi masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi juga dapat memperkaya wawasan siswa melalui seminar, diskusi, dan lokakarya. Selain itu, keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kuliah tamu, bimbingan akademik, dan mentoring dapat membantu siswa memahami serta menganalisis dinamika politik secara lebih kritis.

Tantangan dan solusi dalam implementasi politik sebagai mata pelajaran mandiri

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran demokrasi dan partisipasi aktif di kalangan siswa. Namun, implementasi politik sebagai mata pelajaran mandiri di sekolah menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan objektif. Diantara tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi politik sebagai mata pelajaran mandiri adalah kurangnya tenaga pengajar yang kompeten dalam bidang politik. Tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan politik atau pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan dan demokrasi. Dalam banyak kasus, mata pelajaran ini diajarkan oleh guru dari bidang ilmu sosial secara umum, bukan oleh mereka yang memiliki spesialisasi dalam politik atau pemerintahan. Bahkan, lulusan fakultas politik sekalipun tidak selalu memiliki kompetensi mengajar yang memadai (Juri & Suparno, 2020). Akibatnya, penyampaian materi dapat menjadi kurang mendalam, bahkan berisiko menimbulkan kesalahan dalam menjelaskan konsep-konsep politik yang kompleks.

Tantangan berikutnya adalah adanya resistensi terhadap pembelajaran politik di sekolah karena dianggap sensitif atau kontroversial. Politik sering kali dipandang sebagai topik sensitif yang dapat memicu perdebatan di masyarakat. Kekhawatiran ini datang dari berbagai pihak, seperti orang tua, guru, dan pemangku kebijakan sekolah, yang takut bahwa pembelajaran politik dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi tertentu atau memengaruhi preferensi politik siswa. Ketakutan tersebut sering kali berakar pada kekhawatiran akan adanya doktrinasi politik yang tidak netral, sehingga menimbulkan resistensi terhadap pendidikan politik di sekolah. Akibatnya, politik kerap dianggap sebagai isu tabu yang sebaiknya tidak diajarkan secara eksplisit dalam lingkungan pendidikan formal. Padahal, sebagaimana dikutip oleh Dudih Sutrisman (2019), Ruslan menegaskan bahwa sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pendidikan politik bagi generasi muda.

Tantangan lain yang berpotensi timbul adalah potensi bias dalam penyampaian materi jika tidak diajarkan secara objektif. Objektivitas dalam pendidikan politik memegang peran krusial. Tanpa pemahaman yang baik tentang netralitas akademik, seorang guru

berisiko menyampaikan materi politik dengan bias tertentu, baik yang disebabkan oleh ideologi pribadi, preferensi politik, maupun tekanan dari pihak-pihak berkepentingan. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena siswa, sebagai generasi muda, rentan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu (Sefyanto et al., 2024). Jika hal ini dibiarkan, pendidikan politik tidak lagi berfungsi untuk membangun pemikiran kritis dan pemahaman demokrasi yang seimbang, melainkan menjadi alat propaganda yang merugikan siswa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembelajaran politik selalu berbasis pada fakta dan bersifat netral.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa strategi yang dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasinya yaitu mengadakan pelatihan bagi guru agar memiliki pemahaman politik yang netral dan berbasis akademik. Pelatihan bagi guru harus terus ditingkatkan agar mereka dapat meningkatkan kualitas pengajaran serta mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan (Saptadi et al., 2024). Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam menyelenggarakan pelatihan atau sertifikasi guna meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam mengajar politik. Pelatihan ini harus menekankan pentingnya objektivitas, pendekatan ilmiah, serta strategi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, diharapkan guru tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang politik, tetapi juga mampu menyampaikannya secara objektif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga peserta didik dapat memahami materi secara lebih kritis dan mendalam.

Strategi kedua yaitu menyusun kurikulum yang berbasis pada pendekatan ilmiah dan non-partisan. Menurut Sanusi dan Darmawan (2016), pendidikan politik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai prosedural harus didukung oleh kurikulum yang disusun secara akademik, netral, dan berbasis fakta. Pengetahuan sebagai landasan teoritis dapat diwujudkan melalui materi ajar yang mencakup konsep-konsep dasar politik, sistem pemerintahan, serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi tanpa keberpihakan terhadap kelompok atau ideologi tertentu. Sementara itu, keterampilan sebagai penerapan praktis dapat dikembangkan melalui metode pembelajaran yang interaktif dan aplikatif, seperti diskusi, simulasi, dan analisis kebijakan. Nilai prosedural yang berfungsi sebagai acuan dalam bertindak politik juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum, sehingga siswa memahami batasan etis dalam keterlibatan politik.

Strategi ketiga yakni menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga riset untuk mendukung pengembangan materi ajar. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas

pendidikan politik di sekolah. Perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik yang kaya dan dapat membantu sekolah dalam menyusun materi ajar yang berbasis penelitian dan data empiris. Karena pada dasarnya, perguruan tinggi memiliki peran dan fungsi dalam memberikan pembelajaran politik bagi generasi muda sebagai masa depan bangsa (Saptadi, Holid, et al., 2024). Selain itu, akademisi dan pakar politik dapat diundang untuk memberikan wawasan tambahan bagi guru dan siswa, sehingga pembelajaran politik menjadi lebih objektif dan komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi politik sebagai mata pelajaran mandiri memiliki manfaat seperti; meningkatkan keterlibatan generasi muda, membangun sikap kritis, membentuk kepemimpinan berkualitas, serta mencegah maraknya politik uang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan politik sebagai mata pelajaran mandiri diantaranya; pengembangan kurikulum yang komprehensif, menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan menarik bagi siswa, serta melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya meliputi; kurangnya tenaga pengajar yang kompeten dalam bidang politik, adanya resistensi terhadap pembelajaran politik di sekolah karena dianggap sensitif atau kontroversial, serta bias dalam penyampaian materi jika tidak diajarkan secara objektif. Sedangkan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang ada meliputi; mengadakan pelatihan bagi guru agar memiliki pemahaman politik yang netral dan berbasis akademik, menyusun kurikulum yang berbasis pada pendekatan ilmiah dan non-partisan, serta menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga riset untuk mendukung pengembangan materi ajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2024). *Islam dan Etika Kehidupan Berbangsa*. Expose.
- Agustiani, M., Wijaya, D., & Kurnia, I. (2019). *Keterampilan Dasar dalam Proses Pembelajaran*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma jaya.
- Aminuddin, & Kumalasari, I. (2024). Politik Uang Larangan Dalam Islam dan Pencegahan Pada Pesta Pemilu 2024. *Jurnal Warta Darmawangsa*, 18(3), 643–656.
- Aulia, S. K., Saragih, S. Z., Adi, P. N., & Hubi, Z. B. (2024). Tinjauan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Demokrasi Generasi Z. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1461–1470.
- Azmi, L., Batubara, S. M., & Hati, C. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 173–186.

- Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Sumardi, M. M., ... Judijanto, L. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama.
- Fajarani, A. D., Kurniawati, N., Noor, M. S., Kusumaningtyas, F., Hidayanti, R. I., Octaviani, A., ... Nadya Bella Arthamevira, D. K. S. (2024). *Kisah Politik di Tanah Indonesia*. Serang: Literasi Insan Cita Publishing.
- Hasibuan, Z. E., Siregar, S., Lubis, A. S., Daulay, D., Nasution, F. R. H., Halimahtussa'diyah, ... Siregar, M. A. (2024). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, kuantitatif, kepustakaan dan PTK*. Kepanjen: AE Publishing.
- Juri, & Suparno. (2020). *Pendidikan & Politik*. Jember: Pustaka Abadi.
- Komnas HAM. (2017). *Buku Pendamping untuk Guru dalam Pembelajaran Hak Asasi Manusia Tingkat SMA/SMK*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kurniawan, R. R., Wahyuni, S., & Rahmawati, N. (2023). Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9179–9192.
- Marzuki. (2024). *Buku Strategi Pembelajaran: Model, Metode dan Teknik Pembelajaran*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Mii, R., Reza, M., & Latuda, F. (2023). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *JGP: Jurnal Governance and Politics*, 3(2), 139–153.
- Nissa, S. M., Hasibuan, M. A., Fadhilah, A., Yunanda, Barus, E. I., & Simanjuntak, G. C. (2024). Kelemahan di Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 27011–27020.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442.
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila. *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24–40.
- Saptadi, N. T. S., Alwi, M., Maulani, G., Novianti, W., Muhammadiyah, M., Agustina, Y., ... Holid, A. (2024). *Revolusi Pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Saptadi, N. T. S., Holid, A., Firmansyah, M. R., Sampe, F., Nansi, W. S., Asridiana, ... Fitriani, Y. (2024). *Pendidikan Politik*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Sefyanto, A., Anggraini, M. L., Wibisono, D. R., Bakti, A. D. P., RDP, R. C., Zehrazeti, P., ... Veronika, C. (2024). *Eksistensi Anak Muda*

- dalam Dunia Politik*. Bandung: Indonesia Emas Gorup.
- Setiyono, B. (2024). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugara, H., Mutmainnah, F., & Safitri, D. N. (2024). Pendidikan Politik Lintas Generasi dalam Membangun Partisipasi Politik Menghadapi Suksesi Tahun Politik. *JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 118–128.
- Suparto, D. (2021). *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat* (2nd ed.). Bandung: CV Cendikia Press.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Bogor: Guepedia.
- Tuhuteru, L. (2022). *Pendidikan Politik Kaum Muda Kontemporer*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Wahid, A., & Sadaruddin. (2024). *Buku Ajar Pembelajaran PKN SD*. Bantul: Samudra Biru

JEECCO